



DIY Belum Masuki Puncak Kasus

YOGYA, TRIBUN - Kasus Covid-19 di DIY masih berada di angka 1.500-1.900-an/hari, beberapa hari belakangan. Minggu (20/2), ada 1.807 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan pada Senin (21/2) ada 1.274 kasus penularan baru di DIY. Angka tersebut didapat dari pelacakan kontak erat maupun masyarakat yang mau memeriksakan secara mandiri.

Meski begitu, di beberapa RS, *Bed Occupancy Rate* (BOR)

● ke halaman **11**

DIY Belum

● Sambungan Hal 1

atau tingkat keterisian tempat tidur untuk kasus Covid-19 masih relatif rendah. Namun, sejumlah tempat isolasi terpadu di DIY penuh, bahkan ada daftar tunggu bagi mereka yang mau masuk.

Menanggapi hal tersebut, Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, dr Raden Ludhang Pradipta Rizki MBIotech SpMK menjelaskan, di DIY saat ini belum terlihat tren kasus Covid-19 yang menurun. Itu bisa menjadi indikasi mengapa tingkat keterisian bed RS untuk kasus Covid-19 masih belum memuncak di tengah tren kasus menurun.

"Angka kasusnya itu masih menanjak, ya, Jumat kemarin saja 1.500-an, kalau pun turun, belum drastis. Bisa juga turun, tapi *sunday number*. Artinya, tes yang dilakukan di hari Minggu, lab kan juga tidak beroperasi maksimal dan itu tidak bisa dijadikan patokan angka kasus turun," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, Senin (21/2).

Indikasi lain, tingginya cakupan vaksinasi Covid-19 masyarakat DIY menjadikan gejala penyakit karena virus Sars-CoV-2 itu tidak parah. Sehingga, BOR untuk Covid-19 di RS masih relatif rendah. Dugaannya, sejumlah pasien yang dirawat di RS akibat Covid-19 itu adalah mereka yang memiliki komorbid atau belum mendapatkan vaksin secara tuntas.

"Secara klinis, cakupan vaksinasi di sini kan cukup tinggi. Apalagi, kita juga berbondong-bondong diiringi booster. Ini tandanya, sasaran vaksinasi untuk kelompok rentan sudah tepat," ucapnya.

Maka, dia menilai, tujuan awal dari vaksinasi, yakni agar penyakit tidak menjadi parah jika menjangkiti manusia sudah sesuai. Ludhang juga membandingkan lonjakan kasus Covid-19 di tahun 2021 dan 2022.

"Ya cukup beda, karena di tahun ini sudah ada vaksinasi yang digenot sejak akhir tahun lalu. Kalau pas Delta 2021, itu kan dilema juga, vaksinasi baru berjalan seki-persen, harus terhantam varian Delta. Kocar-kacir," bebernya.

Meski sudah ada vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh, Ludhang berharap, mas-

yarakat juga tetap waspada dengan Covid-19. Dia meminta semua pihak untuk tidak menyepelekan Covid-19 beserta variannya.

Dari gejala, Omicron memang lebih ringan daripada Delta, tapi bukan berarti tidak akan fatal apabila menjangkiti orang rentan. Bahkan, selanjutnya vaksinasi belum merata, maka mutasi virus akan terus ada dan tetap berbahaya. Sehingga, tidak ada salahnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Kalau di RS, saya kira pihak RS juga sudah belajar dari lonjakan kasus Covid-19 karena varian Delta yang lalu, ya. Jadi pasti sudah siap untuk tempat tidur, oksigen, ventilator, dan lain-lainnya," ujar Ludhang lagi.

Ditanya mengenai cara agar kasus turun, dia mengatakan adanya ketegasan pemerintah untuk menyekat sejumlah daerah untuk membatasi mobilitas. Sebab, mobilitas adalah cara utama penyebaran Covid-19. "Salah satu caranya agar kasus turun, ya, pembatasannya diperjelas. PPKM Level 3 ini belum beres level 3. Masih seperti level 2. Kalau pas Delta lalu, level 4 benar-benar terasa," tandasnya.

Rencana pengekangan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, belum bisa memastikan kapan kebijakan pembatasan mobilitas di DIY akan diberlakukan. Raja Keraton Yogyakarta ini masih mengamati perkembangan kasus terkonfirmasi di wilayahnya. "Ya, nanti kita lihat perkembangannya saja," jelas Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (21/2).

Menurutnya, saat ini masyarakat semakin abai untuk menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, pemerintah sempat melonggarkan kebijakan pembatasan aktivitas yang membuat masyarakat terlena.

"Karena masyarakat ini pindah dari level 2 dan 3 agak re-koso. Yang penting itu proses sama pakai masker kalau itu bisa dilalui dan kecenderungannya turun," jelasnya. "Tapi kalau meningkat terus kita enggak bisa memprediksi sampai berapa. Mau sampai berapa ribu (kasus positif) kita kan enggak tahu," tambah Sultan. Sementara itu, Sekda DIY, Kadarmantha Baskara Aji menjelaskan, jika pengekangan

diberlakukan maka skemanya adalah pemeriksaan secara sampel. Nantinya sejumlah petugas akan bersiaga di kawasan perbatasan. Petugas akan memeriksa segala jenis kendaraan yang melintas namun dilakukan secara acak.

Tujuannya adalah untuk memastikan agar pelaku perjalanan yang melintas DIY berada dalam kondisi sehat dan sudah tervaksin Covid-19. Langkah itu diharapkan juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk bepergian.

"Kita tetap melakukan pemeriksaan secara sampel di dekat pintu masuk. Kalau kereta dan pesawat kan sudah di skrining di tempatnya (terminal dan bandara), tapi untuk bus dan kendaraan pribadi itu nanti kita akan skrining secara sampel," urainya.

Sementara itu, Pemkot Yogyakarta menyatakan kesiapannya jika Gubernur DIY menghendaki adanya pembatasan mobilitas. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, pihaknya bisa memahami keresahan Pemda DIY di tengah peningkatan kasus Covid-19 yang semakin menjadi.

Sebagai informasi, di Kota Yogyakarta pada Senin (20/2), tercatat tambahan 249 pasien baru Covid-19, dengan 36 pasien sembuh, serta dua meninggal. Alhasil, kasus aktif kini berada di angka 3.812 kasus. "Kami akan koordinasikan terus dengan provinsi. Kalau Ngarsa Dalam menginginkan pengekangan, tentu kami akan tindak lanjut dengan apa yang diperlukan," lanjutnya.

Ia menilai, pengekangan di Kota Yogyakarta cenderung lebih sederhana lantaran tak berbatasan langsung dengan daerah lain di luar DIY. Hanya saja, opsi tersebut tetap berdampak pada aktivitas perekonomian wilayahnya.

"Bagaimana itu nanti infrastruktur ekonomi kita, karena pedagang di pasar-pasar kita kan banyak yang dari Sleman dan Bantul, kemudian karyawan, pekerja," cetusnya.

Toh, saat ini pihaknya sudah menerapkan one gate system atau skema satu pintu masuk, di mana seluruh rombongan perjalanan dari luar daerah diharuskan singgah di Terminal Giwanggan untuk diperiksa syarat-syarat mobilitasnya, mengenai kelengkapan dokumen vaksinasi coro-

na. "Tapi, one gate system itu memang cuma untuk memori-tor, tidak ada pengekangan, hanya untuk mengidentifikasi warga yang masuk ke wilayah Kota Jogja saja," terangnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan, sebagai wilayah aglomerasi, setiap kebijakan dari provinsi otomatis ditindaklanjutinya secara serentak bersama kabupaten lain di DIY. Sehingga, pihaknya pun masih menanti kemungkinan pengekangan tersebut.

"Pola pengekangannya seperti apa, kan kita harus tunggu (arahannya) dulu. Tapi, yang jelas kalau memang nantinya diterapkan, kita akan lakukan penguatan, agar mobilitas masyarakat lebih terdeteksi," ungkap Heroe.

Periksa

Pemkab Sleman terus berupaya melakukan pengendalian penularan Covid-19. Satu di antaranya dengan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan (prokes) bagi pelaku perjalanan di terminal maupun tempat-tempat wisata.

Kepala Dinas Perhubungan Sleman, Arip Pramana mengungkapkan, pemeriksaan prokes bagi pelaku perjalanan di masa PPKM Level 3 ini rutin dilakukan oleh jajaran di terminal Jombor, Condongcatur, Prambanan, dan Pakem. Selain itu, pemeriksaan prokes juga menjangkau beberapa destinasi wisata di Prambanan maupun Kaliurang. "Terutama pengecekan pemakaian masker ya. Sekaligus, kami juga membagikan masker bagi yang tidak memakai. Pemakaian masker ini perlu digalakkan lagi," kata dia, Senin (21/2).

Menurut Arip, setiap hari pemeriksaan prokes di ruang publik ini melibatkan 5 personel. Khusus Sabtu dan Minggu jumlah personel ditambah menjadi 10 orang. Mereka berkeliling untuk mengingatkan sekaligus membagikan masker kepada masyarakat. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan sejak tanggal 8 Februari hingga saat ini.

Disinggung opsi pengekangan di perbatasan, Arip mengatakan, sampai sejauh ini belum ada pembahasan mengenai pengekangan di Sleman. Jika nantinya memang ada rencana pengekangan, pihaknya mengaku menunggu arahan lanjutan dari Pemda DIY. (ard/tr/aka/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005